WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian alokasi dana Desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 186);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 28a Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 28a);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenganan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Camat adalah Pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpaham kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani Sebagian urusan otonomi Daerah, dan penyelengaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Sangadi atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) tahun rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHP-RD adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kota Kotamobagu.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa ADD dan BHP-RD untuk Desa.
(2) Pengalokasian ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri atas:
    a. ADD sebesar Rp38.050.057.400,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh juta lima puluh tujuh ribu

empat ratus rupiah);

b. bagi hasil pajak Daerah sebesar Rp168.934.900,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); dan
c. bagi hasil retribusi Daerah sebesar Rp. 483.512.600,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

(1) Tata cara pembagian ADD dan BHP-RD untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 adalah:
   a. Untuk tata cara pembagian ADD yakni:
      1. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata untuk semua Desa di Kota Kotamobagu; dan
      2. 40% (empat puluh per seratus) di bagi secara proposional untuk semua Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah angka kemiskinan, dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis.
   b. Untuk tata cara pembagian bagi hasil pajak dan retribusi yakni:
      1. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata untuk semua Desa di Kota Kotamobagu; dan
      2. 40% (empat puluh per seratus) di bagi secara proposional untuk semua Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan variabel realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
(2) Rincian pembagian ADD dan BHP-RD untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHP-RD kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.
(2) Penyaluran ADD dan BHP-RD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. penyaluran ADD dan BHP-RD oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
   b. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
   c. rekening Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rekening Kas Desa yang ditandatangani Sangadi dan Kaur keuangan selaku bendahara Desa; dan
   d. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD dan BHP-RD apabila telah memenuhi ketentuan yang

berlaku.

(3) Penyaluran ADD dan BHP-RD dari RKUD ke RKD dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku.

(4) Waktu dan persentase pertahap disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
   a. tahap I mulai disalurkan pada bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
   b. tahap II mulai disalurkan pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
   c. tahap III mulai disalurkan pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
   d. tahap IV mulai disalurkan pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 5

(1) Permohonan penyaluran ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap I harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;
   b. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2023;
   c. peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2023;
   d. peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran 2022;
   e. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD tahun anggaran 2023.
   f. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD Tahap I tahun anggaran 2023;
   g. keputusan Sangadi tentang penetapan rekening kas Desa dan salinan rekening kas Desa;
   h. keputusan Sangadi tentang penunjukan kepala urusan keuangan sebagai bendahara Desa; dan
   i. surat Keterangan Penyaluran ADD dan BHP-RD Tahap I tahun anggaran 2023 dari Camat.

(2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan sebelum tanggal 30 maret tahun anggaran berkenaan, maka persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d tidak berlaku dan menjadi persyaratan penyaluran ADD dan BHP-RD pada tahap II.

(3) Permohonan penyaluran ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap II harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;
   b. peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran 2022;
   c. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD Tahap II Tahun Anggaran 2023; dan
   d. surat Keterangan Penyaluran ADD dan BHP-RD Tahap II Tahun Anggaran 2023 dari Camat.

(4) Permohonan penyaluran ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap III harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh

Sangadi;

b. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD Tahap III tahun anggaran 2023; dan
c. Surat Keterangan Penyaluran ADD dan BHP-RD Tahap III tahun anggaran 2023 dari Camat.

(5) Permohonan penyaluran ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), untuk tahap IV harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sangadi;
b. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD Tahap IV tahun anggaran 2023; dan
c. surat Keterangan Penyaluran ADD dan BHP-RD Tahap IV tahun anggaran 2023 dari Camat.

Pasal 6

(1) Rincian penggunaan ADD dan BHP-RD setiap tahap disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
(2) Format rincian penggunaan ADD dan BHP-RD setiap tahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dan BHP-RD tahun anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Wali Kota.
(2) Pengelolaan ADD dan BHP-RD untuk tahun anggaran 2023 dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2023

1. PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023
JUMLAH TOTAL ADD: Rp38.050.057.400,00

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Rp)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA (Rp)
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km^2)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+ 12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100)*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	1.522.002.296,00	1,05	0,01	2.584	0,07	1.094	0,05	29,77	0,07	0,20	5,33	811.478.542,16	2.333.480.838,16	2.333.480.800,00
	2	Bilalang Dua	1.522.002.296,00	1	0,01	2.369	0,06	1.261	0,05	35,20	0,09	0,22	5,69	866.397.019,28	2.388.399.315,28	2.388.399.300,00
	3	Pontodon	1.522.002.296,00	0,67	0,01	2.042	0,06	729	0,03	34,41	0,08	0,18	4,70	715.363.236,71	2.237.365.532,71	2.237.365.500,00
	4	Sia	1.522.002.296,00	1,59	0,02	353	0,01	243	0,01	29,01	0,07	0,11	2,93	446.620.376,36	1.968.622.672,36	1.968.622.700,00
	5	Pontodon Timur	1.522.002.296,00	1,13	0,02	932	0,03	423	0,02	29,02	0,07	0,13	3,39	515.420.391,24	2.037.422.687,24	2.037.422.700,00
JUMLAH			**7.610.011.480,00**	**5,44**	**0,07**	**8.280**	**0,23**	**3.750**	**0,16**	**157,40**	**0,39**	**0,85**	**22,05**	**3.355.279.565,74**	**10.965.291.045,74**	**10.965.291.000,00**

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	1.522.002.296,00	3,17	0,04	2.402	0,07	1.154	0,05	32,03	0,08	0,24	6,16	937.874.890,67	2.459.877.186,67	2.459.877.200,00
	2	Moyag Todulan	1.522.002.296,00	2,38	0,03	1.685	0,05	878	0,04	19,74	0,05	0,16	4,28	651.469.240,39	2.173.471.536,39	2.173.471.600,00
	3	Moyag Tampoan	1.522.002.296,00	2,24	0,03	1.543	0,04	713	0,03	22,06	0,05	0,16	4,09	623.101.182,39	2.145.103.478,39	2.145.103.500,00
	4	Kobo Kecil	1.522.002.296,00	8,78	0,12	3.063	0,08	2.011	0,09	33,08	0,08	0,37	9,64	1.466.981.729,96	2.988.984.025,96	2.988.984.000,00
JUMLAH			**6.088.009.184,00**	**16,57**	**0,22**	**8.693**	**0,24**	**4.756**	**0,20**	**106,91**	**0,26**	**0,93**	**24,17**	**3.679.427.043,42**	**9.767.436.227,42**	**9.767.436.300,00**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	1.522.002.296,00	9,16	0,12	3.836	0,11	2.247	0,10	21	0,05	0,38	9,81	1.493.342.735,74	3.015.345.031,74	3.015.345.000,00
	2	Poyowa Besar Dua	1.522.002.296,00	17,47	0,24	2.612	0,07	1.762	0,08	21	0,05	0,44	11,36	1.729.619.723,46	3.251.622.019,46	3.251.622.000,00
	3	Tabang	1.522.002.296,00	6,51	0,09	3.071	0,08	1.990	0,08	25,81	0,06	0,32	8,35	1.271.571.989,67	2.793.574.285,67	2.793.574.300,00
	4	Poyowa Kecil	1.522.002.296,00	7,59	0,10	4.124	0,11	2.017	0,09	21,24	0,05	0,35	9,23	1.404.355.185,89	2.926.357.481,89	2.926.357.500,00
	5	Bungko	1.522.002.296,00	8,11	0,11	1.718	0,05	1.096	0,05	24,04	0,06	0,26	6,85	1.042.023.540,89	2.564.025.836,89	2.564.025.800,00
	6	Kopandakan Satu	1.522.002.296,00	2,8	0,04	4.129	0,11	2.050	0,09	30,69	0,08	0,31	8,18	1.244.403.175,19	2.766.405.471,19	2.766.405.500,00
JUMLAH			**9.132.013.776,00**	**52**	**0,70**	**19.490**	**0,53**	**11.162**	**0,48**	**144,06**	**0,35**	**2**	**54**	**8.185.316.350,84**	**17.317.330.126,84**	**17.317.330.100,00**
JUMLAH TOTAL			**22.830.034.440,00**	**73,65**	**1,00**	**36.463**	**1,00**	**23.418**	**0,84**	**408,37**	**1,00**	**3,84**	**122,05**	**15.220.022.960,00**	**38.050.057.400,00**	**38.050.057.400,00**

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023
JUMLAH TOTAL BHP: Rp168.934.900,00

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI MERATA (AM)	ALOKASI PROPORSIONAL (AP)					JUMLAH TOTAL SETIAP DESA (Rp)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA (Rp)
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL						
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA						
			JUMLAH (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				%	KVP					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7X 100)/Tot. 7)*	*9 (40%X15XTot.PAJAK /100))*	*10*	*11*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	6.757.396,00	92,77	1,14	1,14	7,65	5.171.112,51	11.928.508,51	11.928.500,00
	2	Bilalang Dua	6.757.396,00	96,51	1,19	1,19	7,96	5.379.584,65	12.136.980,65	12.137.000,00
	3	Pontodon	6.757.396,00	99,96	1,23	1,23	8,25	5.571.891,84	12.329.287,84	12.329.300,00
	4	Sia	6.757.396,00	100	1,23	1,23	8,25	5.574.121,49	12.331.517,49	12.331.500,00
	5	Pontodon Timur	6.757.396,00	90,3	1,11	1,11	7,45	5.033.431,71	11.790.827,71	11.790.800,00
JUMLAH			**33.786.980,00**	**95,91**	**5,90**	**5,90**	**39,56**	**26.730.142,19**	**60.517.122,19**	**60.517.100,00**

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	6.757.396,00	72,83	0,90	0,90	6,01	4.059.632,68	10.817.028,68	10.817.000,00
	2	Moyag Todulan	6.757.396,00	84,04	1,03	1,03	6,93	4.684.491,70	11.441.887,70	11.441.900,00
	3	Moyag Tampoan	6.757.396,00	68,91	0,85	0,85	5,68	3.841.127,12	10.598.523,12	10.598.500,00
	4	Kobo Kecil	6.757.396,00	82,04	1,01	1,01	6,77	4.573.009,27	11.330.405,27	11.330.400,00
JUMLAH			**27.029.584,00**	**76,96**	**3,79**	**3,79**	**25,39**	**17.158.260,77**	**44.187.844,77**	**44.187.800,00**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	6.757.396,00	78,84	0,97	0,97	6,50	4.394.637,38	11.152.033,38	11.152.000,00
	2	Poyowa Besar Dua	6.757.396,00	74,82	0,92	0,92	6,17	4.170.557,70	10.927.953,70	10.928.000,00
	3	Tabang	6.757.396,00	58,91	0,73	0,73	4,86	3.283.714,97	10.041.110,97	10.041.100,00
	4	Poyowa Kecil	6.757.396,00	62,40	0,77	0,77	5,15	3.478.251,81	10.235.647,81	10.235.700,00
	5	Bungko	6.757.396,00	60,58	0,75	0,75	5,00	3.376.802,80	10.134.198,80	10.134.200,00
	6	Kopandakan Satu	6.757.396,00	89,37	1,10	1,10	7,37	4.981.592,38	11.738.988,38	11.739.000,00
JUMLAH			**40.544.376,00**	**70,82**	**5,23**	**5,23**	**35,05**	**23.685.557,04**	**64.229.933,04**	**64.230.000,00**
JUMLAH TOTAL			**101.360.940,00**	**81,23**	**14,92**	**14,92**	**100,00**	**67.573.960,00**	**168.934.900,00**	**168.934.900,00**

3. PEMBAGIAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023
JUMLAH TOTAL RETRIBUSI DAERAH: Rp483.512.600,00

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI MERATA (AM)	ALOKASI PROPORSIONAL (AP)					JUMLAH TOTAL SETIAP DESA (Rp)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA (Rp)
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL						
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA						
			JUMLAH (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				%	KVR					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7X 100)/Tot. 7)*	*9 (40%X15XTot.RETRIBUSI /100))*	*10*	*11*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	19.340.504,00	61,1	0,87	0,87	5,80	11.212.152,33	30.552.656,33	34.907.600,00
	2	Bilalang Dua	19.340.504,00	91,28	1,30	1,30	8,66	16.750.331,66	36.090.835,66	35.439.900,00
	3	Pontodon	19.340.504,00	77,46	1,10	1,10	7,35	14.214.293,28	33.554.797,28	31.201.000,00
	4	Sia	19.340.504,00	85,88	1,22	1,22	8,15	15.759.404,94	35.099.908,94	30.878.800,00
	5	Pontodon Timur	19.340.504,00	96,39	1,37	1,37	9,15	17.688.041,94	37.028.545,94	26.630.600,00
JUMLAH			**96.702.520,00**	**82,42**	**5,87**	**5,87**	**39,10**	**75.624.224,14**	**172.326.744,14**	**159.057.900,00**

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	19.340.504,00	70,72	1,01	1,01	6,71	12.977.469,93	32.317.973,93	34.907.600,00
	2	Moyag Todulan	19.340.504,00	69,16	0,99	0,99	6,56	12.691.202,21	32.031.706,21	34.907.600,00
	3	Moyag Tampoan	19.340.504,00	47,3	0,67	0,67	4,49	8.679.784,04	28.020.288,04	30.237.400,00
	4	Kobo Kecil	19.340.504,00	67,12	0,96	0,96	6,37	12.316.852,11	31.657.356,11	32.195.800,00
JUMLAH			**77.362.016,00**	**63,58**	**3,62**	**3,62**	**24,13**	**46.665.308,29**	**124.027.324,29**	**132.248.400,00**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	19.340.504,00	64,27	0,92	0,92	6,10	11.793.863,01	31.134.367,01	29.781.300,00
	2	Poyowa Besar Dua	19.340.504,00	76,14	1,08	1,08	7,22	13.972.066,74	33.312.570,74	31.213.500,00
	3	Tabang	19.340.504,00	50,08	0,71	0,71	4,75	9.189.927,80	28.530.431,80	30.427.400,00
	4	Poyowa Kecil	19.340.504,00	62,95	0,90	0,90	5,97	11.551.636,48	30.892.140,48	35.137.900,00
	5	Bungko	19.340.504,00	57,65	0,82	0,82	5,47	10.579.060,26	29.919.564,26	34.948.000,00
	6	Kopandakan Satu	19.340.504,00	76,45	1,09	1,09	7,25	14.028.953,28	33.369.457,28	30.698.200,00
JUMLAH			**116.043.024,00**	**64,59**	**5,52**	**5,52**	**36,77**	**71.115.507,57**	**187.158.531,57**	**192.206.300,00**
JUMLAH TOTAL			**290.107.560,00**	**70,20**	**15,01**	**15,01**	**100,00**	**193.405.040,00**	**483.512.600,00**	**483.512.600,00**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023

1. FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP TAHAP

RINCIAN PENGGUNAAN ADD,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III/TAHAP IV*)
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA :
KECAMATAN : KOTAMOBAGU.....

A. RINCIAN PENGGUNAAN ADD (TAHAP I/TAHAP II/ TAHAP III/TAHAP IV*)

Ko Rek.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. 1.1. 1.1.1. 5. 5.1.1. 5.1.1.01	Bidang..... Sub Bidang..... Kegiatan: ..... Belanja	.....	.....	.....
	JUMLAH			.....

B. RINCIAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III/TAHAP IV*)

Ko Rek.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1. 1.1. 1.1.1. 5. 5.1.1. 5.1.1.01	Bidang..... Sub Bidang..... Kegiatan: ..... Belanja	.....	.....	.....
	JUMLAH			.....

C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DI SETIAP BIDANG (TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III/TAHAP IV*)

1. ADD:

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	.....
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	.....
	JUMLAH	.....

2. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH:

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	.....
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	.....
	JUMLAH	.....

Mengetahui,
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan
Desa/Sangadi

.....

.....20..
Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa / Sekretaris Desa

.....

Keterangan:
*) Coret salah satu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA